



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

S

**BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

Kata Pangantar

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt Tuhan seru sekalian alam, atas berkat-Nya jualah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung menuju terwujudnya Good Governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan LAKIP Tahun 2022 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan akan digunakan sebagai bahan peningkatan serta perbaikan kinerja selanjutnya.

Bandar Lampung, Februari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4. Analisa Aspek Strategi	6
1.5 Masalah Utama (isu Startegis)	8
BAB II VISI MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	10
2.1. Visi dan Misi Organisasi	10
2.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	14
2.3. Strategi dan Kebijakan	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
3.2 Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Pemecahan Masalah	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) sangat dibutuhkan tuntutan pelayanan publik kearah yang transparan, partisipasif dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang - undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyusunan Laporan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Program dan Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. LAKIP sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program tahun sebelumnya dan juga sebagai bahan dalam penyusunan program/kegiatan untuk tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung ;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung; adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

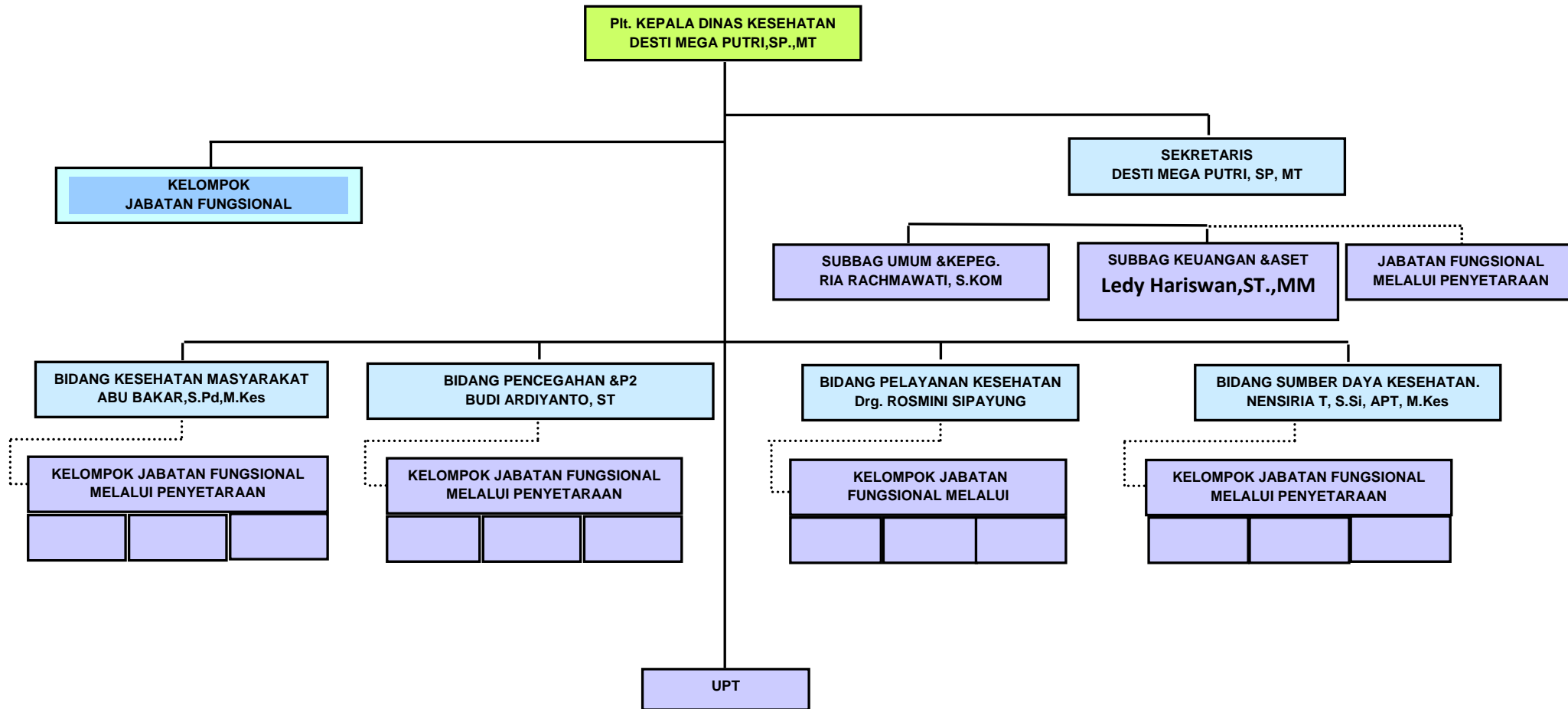
- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelapoean sesuai dengan lingkup tugasnya

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas;
2. Bagian Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan aset;
 - c. Jabatan fungsional melalui penyetaraan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan fungsional melalui penyetaraan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG



B. ANALISA ASPEK STRATEGI

Aspek strategi adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, aspek – aspek tersebut adalah :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2022, termasuk UPT sebanyak 1.297 orang, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 1.139 orang. Sebagian besar merupakan tenaga kesehatan dan terdistribusi di UPT Dinas Kesehatan seperti UPT Puskesmas, UPT Gudang Farmasi.

Jumlah PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2022 Berdasarkan Jabatan berjumlah 1.297 orang yang terdiri dari : sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

1. JUMLAH PNS DI PUSKESMAS : 1.206

1.	Dr. Umum	:	157
2.	Dr. Gigi	:	57
3.	Bidan	:	336
4.	Perawat	:	271
5.	Pranata Laboratorium Kesehatan	:	50
6.	Sanitarian	:	35
7.	Asiten Apoteker	:	14
8.	Apoteker	:	40
9.	Perawat Gigi	:	38
10.	Penyuluh	:	43
11.	Nutrisionis	:	39
12.	Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	:	11
13.	Epidemiologi Kesehatan	:	4
14.	Administrator Kesehatan	:	1
15.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	:	109

2. JUMLAH PNS DI DINAS KESEHATAN : 83

1.	Apoteker	:	1
2.	Epidemiologi Kesehatan	:	1
3.	Administrator Kesehatan	:	7
4.	Perencana	:	1
5.	Analisis Kepegawaian	:	1
6.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	:	72

3. JUMLAH PNS DI UPT INSTALASI FARMASI : 8

1.	Apoteker	:	1
2.	Asisten Apoteker	:	2
3.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	:	5

Sumber Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana berupa Puskesmas dan jaringannya yaitu, Puskesmas Pembantu, Poskeskel, Posyandu dan Puskesmas keliling. Secara rinci jumlah sarana dan prasarana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
di Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas	
	a. Puskesmas Rawat Inap	15
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	16
2	Puskesmas Pembantu	50
3	Posyandu	705
4	Poskeskel	126
5.	Ambulan/Puskesmas keliling	65

Sumber Data : Sub. Program dan Informasi Tahun 2022

3. Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.2.
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung T.A 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1.	BELANJA OPERASI	311,477,649,857
2.	BELANJA MODAL	11,471,010,320
	JUMLAH	322,948,660,177

Sumber Data : Sub Bag Program dan Informasi Tahun 2022

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU-ISU STRATEGIS)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pembangunan di bidang kesehatan dapat diidentifikasi permasalahan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Permasalahan Bidang Kesehatan
di Kota Bandar Lampung T.A 2022

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi dan balita Masih adanya kasus stunting Masih adanya kasus penyakit menular (TBC, Diare, DBD, HIV) Masih adanya kasus kematian akibat penyakit menular (TBC, Diare, DBD HIV) 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kasus preeklamsia, anemi dan penyakit penyerta lainnya pada ibu hamil Adanya bayi dan balita yang berada di garis merah Kualitas kesehatan lingkungan belum optimal Belum optimalnya Pemahaman masyarakat tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti TBC, diare DBD, HIV

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		5. Masih adanya kasus penyakit tidak menular dan degeneratif seperti darah tinggi, diabetes, stroke.	5. Pola hidup masyarakat kurang sehat /tidak melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (merokok,kurang aktifitas fisik,makanan kurang sehat)
		6. Mutu dan akses pelayanan kesehatan belum maksimal	6. Penempatan tenaga kesehatan yang belum merata di fasilitas 7. pelayanan kesehatan Belum tercukupinya kebutuhan beberapa jenis tenaga fungsional kesehatan (kesehatan lingkungan, kefarmasian, analisis laboratorium, rekam medik).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1. Visi Dan Misi Kota Bandar Lampung

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi tersebut dapat dijabarkan dalam tafsir visi sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYA SAING: Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan

KEMAKMURAN : yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku)

pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA: Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka melayani kebutuhan distribusi perekonomian dan pengembangan investasi serta kebutuhan sosial masyarakat.

MISI KEEMPAT: Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI KELIMA: Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang religius, berbasis keluarga dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM: Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan yang didukung oleh tingkat keamanan kota terpadu dengan melibatkan kerjasama antara aparat keamanan serta partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan

salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam upaya melaksanakan visi dan misi Walikota dan Wakil Waliota Bandar Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dijalankan. Penetapan tujuan dan sasaran ini tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang tentunya harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai kemudian ditetapkan indikator sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sasaran 1 yaitu Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan 12 indikator sasaran yaitu :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 4. Pelayanan Kesehatan Balita
 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia
 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan 5 indikator sasaran yaitu :
1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
 2. Insidensi TB per 100.000 penduduk
 3. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan
 4. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
 5. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan 1 indikator sasaran yaitu : Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan

2.2. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran program pembangunan bidang kesehatan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan. Rumusan strategis ini selanjutnya dijabrakan dalam pelaksanaan kebijakan pembnagunan bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung. Secara lengkap tujuan, sasaran, rumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung daat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Periode 2021-2026

Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.								
Misi 1	: Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Mengoptimalkan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terutama Puskesmas melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kesehatan untuk masyarakat					
2.		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang meliputi pembiayaan, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana terutama peralatan kesehatan, obat dan vaksin di Puskesmas.	2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar Puskesmas melalui akreditasi Puskesmas 3. Pengembangan profesionalitas SDM kesehatan baik medis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi 4. Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 5. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah (Covid 19) 6. Pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional					

Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.								
Misi 1	: Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.		Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Mengoptimalkan jaminan keamanan. Khasiat, kemanfaatan dan mutu kefarmasian termasuk obat tradisional dan makanan	7. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan. Khasiat, kemanfaatan dan mutu kefarmasian termasuk obat tradisional dan makanan					

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (TAPKIN) tahun 2022

1. EVALUASI DAN ANALISIS KERJA

Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai indikator sasaran dimaksud Dinas Kesehatan telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 baik bersumber dana dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2022. Secara rinci capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100,00
		2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100	100,00
		3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100,00
		4. Pelayanan Kesehatan Balita	100	100,00
		5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100,00
		6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	95,17
		7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100	100,00
		8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100,00
		9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100,00
		10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100,00
		11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100,00
		12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	95,76
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	13. Kasus Kematian Ibu (AKI)	10	4
		14. Insidensi TB per 100.000 penduduk	231/ 100.000	347/ 100.000
		15. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	71	94,4
		16. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	60	60
		17. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9	4,2
3.	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	18. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	55	55 (100%)

Berdasarkan tabel capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Sasaran I : Terpenuhinya Standar Pelayanan Minima (SPM) Bidang Kesehatan, dengan 12 indikator sasaran yaitu :

Tabel 3.3 Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	19.592	19.592	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)	18.702	18.702	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	17.811	17.811	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.512	86.512	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	155.442	155.442	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	754.465	718.053	95,17
7	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	92.994	92.994	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200.001	200.001	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.644	18.644	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.882	1.882	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	23.474	23.474	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	28.060	26.870	95,76

SPM Bidang Kesehatan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019 tersebut terdapat 12 indikator yang harus dicapai dalam satu tahun. Pada tahun 2022 sebagian besar indikator pelayanan dasar dalam SPM sudah mencapai target diatas 95 persen, bahkan 10 (sepuluh) indikatornya telah mencapai 100 persen, namun demikian Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam mendukung tercapainya Visi Misi Wali Kota Bandar Lampung untuk menciptakan masyarakat Kota Bandar Lampung yang sehat.

II. Sasaran II: Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan indikator sasaran :

A. Kasus kematian ibu

Kondisi Maternal menggambarkan dari besarnya kasus Kematian Ibu (AKI) melahirkan. Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kota Bandar Lampung berjumlah 10 kasus (2 per 100.000 kelahiran hidup). Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 15 kasus (3 per 100.000 kelahiran hidup). Untuk tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu melahirkan menurun tajam menjadi 4 kasus. Upaya akan terus dilakukan Dinas Kesehatan untuk menurunkan kasus kematian ibu melahirkan ini. Dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor dalam upaya menurunkan kasus ini perlu terus ditingkatkan.

B. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

Saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk menanggulangi kasus Tuberkulosis ini. Penemuan kasus secara dini terus dilakukan guna percepatan pengobatan, karena dengan penemuan secara dini maka penderita akan cepat diobati dan disembuhkan sehingga tidak menularkan kepada kepa orang lain. Jumlah kasus Tuberkulosis tahun 2021 yang ditemukan dan diobati

sebanyak 207 per 100.000 penduduk dan tahun 2022 jumlah kasus yang ditemukan dan diobati meningkat menjadi 347 per 100.000 penduduk. Banyak penyebab terjadinya kasus tuberculosis diantaranya adalah kualitas lingkungan yang kurang sehat, faktor nutrisi, penyakit penyerta lainnya seperti HIV dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit Tuberkulosis. Untuk itu berbagai upaya dan program terus dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga Swadaya Masyarakat/CSR Inisiasi Lampung sehat (ILS). Terdapat 4 (empat) program yang dilakukan yaitu :

1. Investigasi kontak, dimana mendeteksi TBC dengan melakukan skrining/tracing TBC dengan sasaran kontak rumah. Program.
2. Menggencarkan imunisasi BCG.
3. Dengan mengedukasi masyarakat tentang TBC melalui kegiatan promosi kesehatan
4. Pemberian terapi pencegahan Tuberkulosis (TPT) ke kontak rumah pasien TBC untuk mencegah terjadinya infeksi laten Tuberculosis.

C. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan

Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan berbagai penyakit dengan membangun sistem imun tubuh melalui pemberian vaksin. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, setiap orang harus atau wajib untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya. Imunisasi dasar lengkap sendiri terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 2 dosis DPT-Hepatitis B, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Capaian imunisasi lengkap tahun 2021 di Kota Bandar Lampung sebanyak 16.108 bayi

dari jumlah total bayi yang ada sebanyak 17.340 bayi atau sebesar 92,9 persen. Jumlah capaian imunisasi tahun 2021 ini lebih besar dibandingkan tahun sebelum (tahun 2020) sebesar 84,7 persen. Pada Tahun 2022 capaian imunisasi dasar lengkap di Kota Bandar Lampung meningkat sebesar 94,4 persen.

D. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jenis tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas minimal dengan 9 jenis tenaga kesehatan yaitu

1) Dokter 2) Dokter Gigi 3) Perawat 4) Bidan 5) Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku 6) tenaga sanitasi lingkungan 7) nutrisisionis 8) tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian 9) ahli teknologi laboratorium medik. Tahun 2021 dari 31 Puskesmas di Kota Bandar Lampung baru 14 Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya, 17 Puskesmas belum terpenuhi. Ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas ini adalah tenaga kesehatan berstatus ASN dan sesuai dengan kompetensi jenis tenaga kesehatannya. Kekurangan jenis tenaga kesehatan ini dipenuhi dengan rekrutmen tenaga kontrak dan usulan pengadaan jenis kesehatan sebagai ASN.

E. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun

Prevalensi merokok pada remaja usia sekolah atau usia 10-18 tahun mengalami kenaikan, menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 persentase perilaku merokok pada remaja tercatat sebesar 9,1 persen, meningkat dari Riskesdas 2013 yakni sebesar 7,2 persen. Pada Tahun 2022 persentase usia 10-18 tahun yang merokok di Kota Bandar Lampung

sebesar 4,51 persen. Meski angka ini masih di bawah target sebesar 8,90 persen namun tetap menjadi perhatian.

III. Sasaran III: Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Dengan indikator sasaran yaitu : Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan. Capaian dari sasaran III ini berupa pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional pada fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat). Sampai dengan tahun 2022 jumlah apotek di Kota Bandar Lampung 260 apotek, toko obat berjumlah 24.

IV. Capaian Kegiatan Stunting

Uraian	Tahun	
	2021	2022
Jumlah Baduta	17.539	17.373
Baduta Stunting	1.166	897
Prevalensi	6,6	5,16

Berdasarkan tabel di atas tahun 2022 prevalensi stunting baduta sebesar 5,16 %, angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yaitu 6,6%. Penurunan angka ini merupakan komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung dalam program percepatan penurunan stunting.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan dalam penurunan dan pencegahan stunting, antarlain :

1. Penuhi gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan dan hingga 8000 hari pertama kehidupan.

2. Promosi dan dukungan menyusui, termasuk ASi I eksklusif
3. Kampanye gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat
4. Edukasi dan konseling dg memanfaatkan berbagai media, seperti telepon, SMS, whatapp group
5. Mengawasi donasi/pemberian susu formula
6. Pemberian suplementasi gizi
7. Terus pantau tumbuh kembang anak
8. Selalu menjaga kebersihan, senantiasa menggunakan air bersih dan jamban sehat
9. Balita mendapat imunisasi lengkap
10. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri usia
11. Peningkatan komunikasi antar pribadi
12. Pemeriksaan kehamilan minimal 6x
13. Kampanye Gerakan Cegah Stunting dengan kegiatan :
 - a. Gerakan Aksi Bergizi : membentuk kebiasaan olahraga, sarapan dan konsumsi tablet tambah darah pada remaja di sekolah
 - b. Gerakan Bumil Sehat : tingkat pemeriksaan dan pengetahuan ibu hamil untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil
 - c. Gerakan Posyandu Aktif : meningkatkan cakupan tumbuh kembang balita di posyandu untuk deteksi dini dalam mencegah balita gizi kurang dan stunting
 - d. Gerakan Cegah Stunting itu Penting: mengedukasi masyarakat tentang stunting dan pencegahannya
14. Peningkatan konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting yang terintegrasi di Kota Bandar Lampung, dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

15. Peningkatan kualitas pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, termasuk revitalisasi peralatan antropometri/pengukuran di posyandu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu melalui refreshing kader.
16. Penurunan angka kesakitan pada balita dengan penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit, imunisasi lengkap dan pemberian kapsul vitamin A pada balita.
17. Peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi dan Kesehatan melalui penyuluhan dan konseling, antara lain ASI Eksklusif, Pemberian makan bayi dan anak (PMBA), dan pemantauan pertumbuhan.
18. Pemberdayaan keluarga 1000 HPK untuk membantu meningkatkan kualitas konsumsi makanan keluarga sehingga konsumsi gizi untuk keluarga terutama balita memenuhi kebutuhan gizi seimbang.
19. Pemberdayaan masyarakat untuk membangun sistem sanitasi yang layak.
20. Peningkatan sosialisasi kepemilikan JKN/BPJS
21. Peningkatan KIE tentang penghentian kebiasaan merokok.
22. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan pemberdayaan remaja melalui posyandu remaja
23. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksaan kehamilan, yaitu minimal 6x selama kehamilan dan memenuhi standar 10 T, dilengkapi dengan USG 2D oleh dokter umum yang telah terlatih.
24. Pemberian pencegahan kecacingan pada balita.

IV. Capaian Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. UHH Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah 71,66. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021 sebesar 71.42.

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun 2022 Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang dikehendaki dalam rencana strategis sebagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Total Realisasi Keuangan (Rp.)	Persentase (%)
1	BELANJA DAERAH	322.948.660.177	266.296.837.440	82,46
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.459.565.642	102.218.990.175	95,12
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	16.486.420	82,43
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	20.000.000	16.486.420	82,43
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.229.592.969	79.905.464.706	98,37
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.013.592.969	79.710.866.706	98,39
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi	216.000.000	194.598.000	90,09
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.560.763	191.688.595	94,63
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	20.000.000	19.936.000	99,68
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	46.201.200	92,40
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.060.763	11.966.000	99,21

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Total Realisasi Keuangan (Rp.)	Persentase (%)
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.200.000	97,33
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	44.914.800	89,83
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	7.500.000	7.500.000	100,00
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	6.982.500	87,28
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25.000.000	24.988.095	99,95
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.503.750.000	21.747.894.602	85,27
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	157.974.602	87,76
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.323.750.000	21.589.920.000	85,26
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.661.910	357.455.852	70,97
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Kendaraan	42.992.000	34.758.600	80,85
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	450.669.910	312.722.252	69,39
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.975.000	99,75
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	213.161.759.960	162.647.982.690	76,30
II.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah	14.653.242.535	8.529.566.606	58,21
02	Pembangunan Puskesmas	2.008.389.065	2.008.389.065	100,00
14	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas	2.271.339.730	228.752.330	10,07
15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	74.615.000	74.615.000	100,00
16	Pengadaan Obat Vaksin	6.251.902.889	3.205.133.775	51,27
17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.046.995.851	3.012.676.436	74,44
II.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	198.498.517.425	154.110.211.684	77,64
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.095.000	61.568.600	99,15

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Total Realisasi Keuangan (Rp.)	Persentase (%)
02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	91.139.000	0	0
03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	20.200.000	19.840.000	98,22
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.750.000	35.250.000	98,60
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	20.000.000	19.696.000	98,48
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.100.000	28.692.000	98,60
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.138.000	44.157.000	97,83
08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.865.000	22.365.000	97,81
09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	20.000.000	19.952.000	99,76
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	25.000.000	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000	28.356.000	94,52
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	32.775.000	31.878.000	97,26
13	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	87.710.500	86.767.450	98,92
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	13.033.394.900	6.990.816.400	53,64
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.036.517.000	2.657.861.400	87,53
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	148.971.100	145.253.100	97,50
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	210.118.000	209.519.000	99,71
19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.000.000	29.904.000	99,68
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	35.000.000	33.904.000	96,87
21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.000.000	28.558.400	95,19
22	Pengelolaan Jaminan	79.991.087.325	61.525.209.925	76,92

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Total Realisasi Keuangan (Rp.)	Persentase (%)
	Kesehatan Masyarakat			
24	Operasional Pelayanan Puskesmas	88.083.186.000	77.401.184.809	87,87
25	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.138.061.000	4.689.478.600	35,69
II.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	10.000.000	8.204.400	82,04
01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000	8.204.400	82,04
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.156.300.000	506.300.000	43,79
III.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusi Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	350.000.000	35,00
01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	1.000.000.000	350.000.000	35,00
III.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.300.000	156.300.000	100,00
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	156.300.000	156.300.000	100,00
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	321.839.975	187.107.975	58,14
IV.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975	25.363.975	100,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975	25.363.975	100,00
IV.2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	156.740.000	91.660.000	58,48

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	
			Total Realisasi Keuangan (Rp.)	Persentase (%)
01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	156.740.000	91.660.000	58,48
IV.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	139.736.000	70.084.000	50,15
01	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	139.736.000	70.084.000	50,15
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	849.194.600	736.456.600	86,72
V.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	508.834.000	407.866.400	80,16
01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	508.834.000	407.866.400	80,16
V.2	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif tingkat daerah Kabupaten/kota	340.360.600	328.590.200	96,54
01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	340.360.600	328.590.200	96,54
	JUMLAH	322.948.660.177	322.948.660.177	82,46

Berdasarkan tabel 3.4 realisasi anggaran Dinas kesehatan Tahun 2022, meskipun dalam kondisi pandemi covid- 19 yang membatasi aktifitas secara tatap muka/pertemuan langsung, pelayanan kesehatan masih dapat mencapai hasil meskipun belum maksimal.

Dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung Program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022

berdasarkan Indikator Sasaran dan Target dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.948.660.177 dengan realisasi sebesar Rp. 322.948.660.177 (82,46 %). Anggaran tersebut diperuntukan bagi 5 Program dan 18 kegiatan dan 59 Sub Kegiatan bidang kesehatan. Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 16 sub kegiatan merupakan program pendukung bagi terselenggaranya tupoksi Dinas Kesehatan yang bersifat rutin dilaksanakan. Untuk itu yang akan dikupas lebih mendalam adalah pelaksanaan 4 (empat) program lainnya yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 213.161.759.960. Output kinerja dari program adalah angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 10 kasus, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) sebesar 6,50 persen, tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk sebanyak 393 kasus dan cakupan pelayanan BLUD 100 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 162.647.982.690 (76,30 %). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. **14.653.242.535** dan realisasi anggaran Rp. **8.529.566.606 (58,21%)**. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan pendukungnya yaitu :

1.1.1. Pembangunan Puskesmas.

Alokasi anggaran pada Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pembayaran kegiatan pembangunan Puskesmas Kampung Sawah kecamatan Tanjungkarang Timur yang

telah selesai di rehab pada tahun 2021. Rehab bangunan Puskesmas ini untuk memenuhi persyaratan bangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar Kementerian Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.008.389.065, dan anggaran ini telah terealisasi sebesar 100 persen.

1.1.2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini Rp. 2.271.339.730 dengan output kinerja tersedianya peralatan kesehatan di Puskesmas untuk melengkapi kebutuhan peralatan kesehatan sesuai standar. Rincian dari penggunaan anggaran tersebut berupa pembayaran kegiatan pembelian alat kesehatan tahun 2021 sebesar Rp. 118.731.330 (realisasi 100%), dan untuk pembayaran kegiatan pembelian alat kesehatan tahun 2022 sebesar Rp. 1.414.822.460 dan baru terealisasi sebesar Rp. 110.021.000.

1.1.3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 74.615.000 yang dipergunakan untuk pembayaran kegiatan kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, realisasi 100 persen.

1.1.4. Pengadaan obat, vaksin

Dukungan anggaran sebesar Rp. 6.251.902.889 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan obat pelayanan dasar di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran

sebesar 3.205.133.775 (51,27%) yang dipergunakan untuk :

- a) Pembayaran hutang pengadaan obat DAK tahun 2021 sebesar Rp. 1.522.210.740 (realisasi 100%)
- b) Pengadaan obat DAK tahun 2022 Rp. 4.729.692.149. Realisasi sebesar Rp. 1.682.923.035, sehingga masih ada sisa pembayaran kegiatan yang belum terbayarkan di tahun 2022 ini sebesar Rp. 2.823.103.559 dan akan dibayarkan pada tahun 2023.

1.1.5. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Dukungan anggaran sebesar Rp. 4.046.995.851 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan Bahan Habis Pakai di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar 3.012.676.436 (74,44%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.029.100.536 akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. **198.498.517.425,00** dan realisasi anggaran Rp. 154.110.211.683 (77,64 %). Kegiatan ini terdiri dari 23 yang sebagian besar merupakan anggaran untuk mendukung tercapainya standar pelayanan (SPM) bidang kesehatan tahun 2022 yang sebagian besar juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2022, sub kegiatan tersebut yaitu :

1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dukungan anggaran sebesar Rp. 62.095.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah cakupan pemeriksaan ibu hamil, terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada ibu Hamil, tersedianya media penyuluhan untuk Ibu Hamil. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 61.568.600 (99,15%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana.

1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dukungan anggaran sebesar Rp. 91.139.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan RI adalah tersedianya rumah tunggu persalinan dalam upaya untuk menurunkan angka kasus kematian ibu bersalin akibat keterlambatan penanganan dikarenakan kondisi rumah yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi wilayah dan geografis Kota Bandar Lampung dimana akses fasilitas pelayanan kesehatan untuk persalinan mudah dijangkau dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sesuai dengan kondisi dimaksud maka alokasi anggaran tidak dipergunakan.

1.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir

Dukungan anggaran sebesar Rp. 20.200.000 sumber anggaran APBD (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian bayi baru lahir. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.840.000 (98,22%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana. Jumlah kematian bayi dan balita di Kota Bandar

Lampung tahun 2022 berjumlah 69 orang , jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 60 orang, hal ini dikarenakan kematian bayi dan balita dengan kasus covid-19.

1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Dukungan anggaran sebesar Rp. 35.750.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian bayi dan balita. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.250.000,00 (98,6601%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana. Jumlah kematian bayi dan balita di Kota Bandar Lampung tahun 2022 berjumlah 69 orang , jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 60 orang, hal ini dikarenakan kematian bayi dan balita dengan kasus covid-19.

1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 sumber anggaran APBD (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Output kinerja yang ingin dicapai adalah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Untuk Penjangkaran dan Pemeriksaan kesehatan anak usia pendidikan dasar secara berkala. REalisasi anggaran sebesar Rp. 19.696.000 (98,485) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana

1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Dukungan anggaran sebesar Rp. 29.100.000, sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang

ingin dicapai adalah terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan penyakit tidak menular berupa pertemuan Penatalaksanaan Kanker Servik dengan Metode Kryoterapi, Validasi data Program Penyakit Tidak Menular dan bimbingan teknis bagi petugas pengelola kegiatan penyakit tidak menular di Puskesmas. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.692.000 (98,60%) dengan pelaksanaan kegiatan terlaksana 100 persen.

1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut. Dukungan anggaran sebesar Rp. 45.138.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya orientasi penggunaan panduan praktis untuk caregiver informal pada perawatan jangka panjang bagi lansia untuk tenaga kesehatan di Puskesmas. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 44.157.000 (97,83%) dengan realisasi kegiatan 100 persen terlaksana.

1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Dukungan anggaran sebesar Rp. 22.865.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk deteksi dini penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 22.365.000 (97,81%) berupa pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencegahan dan peanggunan penyakit hipertensi.

1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya Pertemuan Penatalaksanaan Diabetes Mellitus bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan bimbingan teknis bagi petugas pengelola kegiatan diabetes mellitus di Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.952.000 (99,76%).

1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 sumber anggaran APBD (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini dianggarkan dalam Perubahan APBD Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi dalam bentuk Pertemuan Sosialisasi kesehatan jiwa bagi petugas kesehatan dan keluarga penderita gangguan jiwa yang ada di Puskesmas. Kegiatan terlaksanan 100 persen. Realisasi anggaran dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan koordinasi berupa pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan penyakit tuberkulosis dan Pendampingan dan Sosialisasi Pengisian Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis SITB Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Pelaksanaan

terlaksana 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.356.000 (94,52%)

1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Dukungan anggaran sebesar Rp. 32.775.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan sosialisasi, monitoring, pelacakan kasus HIV ke masyarakat resiko tertular HIV (populasi kunci). Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini Rp. 31.878.000 (97,26%).

1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB).

Dukungan anggaran sebesar Rp. 87.710.500 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas petugas pengelola data kegiatan surveilan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 86.767.450 (98,92%) dengan realisasi kegiatan terlaksana 100 persen.

1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 13.033.394.900 sumber dana APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2022 yang diperuntukan bagi :

- a) Insentif tenaga kesehatan dalam penanggulangan Covid 19 sebesar Rp. 8.000.000.000 dengan realisasi Rp. 2.707.292.713 (33,84%). Realisasi anggaran ini menyesuaikan dengan jumlah kasus covid yang ditanggulangi pada tahun 2022 yang jumlahnya menurun dan dapat dikendalikan.

b) Operasional pelayanan ambulan gratis dan dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi vaksin covid 19 dan untuk pembayaran hutang insentif tenaga kesehatan dalam penanggulangan covid 19 tahun 2021 sebesar Rp. 4.283.523.687

Pada sub kegiatan ini juga masih adanya kegiatan dari operasional ambulan gratis tahun 2022 yang baru akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 103.995.000.

Berikut data masyarakat yang menggunakan fasilitas ambulan gratis tahun 2022

Tahun	Pasien sakit	Jenazah	Melahirkan	Lakalantas	Jumlah
2017	4.258	234	143	1463	6.098
2018	4.873	144	123	1653	6.793
2019	6.038	113	135	1678	7.964
2020	4.952	105	75	1916	7.048
2021	3.667	61	34	1998	5.760
2022 (Nov)	3.509	44	18	1435	5.006
JUMLAH	25.322	678	524	9394	38.669

1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3.036.517.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK bidang kesehatan tahun 2022. Penggunaan anggaran dari sub kegiatan ini diperuntukan:

- a. Pengadaan alat kesehatan antropometri untuk 31 Puskesmas. Antropometri ini berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh pada berbagai tingkatan umur. Peralatan ini dapat digunakan untuk skrening kasus

gizi pada masyarakat. Alokasi Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.474.733.000 dengan realisasi anggaran Rp. 2.130.060.000 (86,07%)

- b. Beberapa pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan upaya penanggulangan stunting mulai dari penyusunan regulasi, pemantapan kompetensi petugas dalam pelayanan gizi dan penanggulangan stunting serta monitoring dan evaluasi kegiatan Rp. 375.740.000 dengan realisasi anggaran Rp. 341.757.400 (90,96%)
- c. Untuk pembayaran hutang kegiatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 186.044.000 (realisasi 100%)

1.2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 148.971.100. Alokasi anggaran ini diperuntukan bagi kegiatan :

- a. Pembayaran hutang kegiatan tahun 2021 yang besaran anggarannya Rp. 74.639.600 (realisasi 100%)
- b. Kegiatan tahun 2022 berupa advokasi dan koordinasi terkait kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan sebesar Rp. 74.331.500, dengan realisasi anggaran Rp. 70.613.500 (95%).

1.2.15 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 210.118.000. Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2022. Alokasi anggaran dipergunakan untuk pertemuan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya pelayanan promosi

kesehatan ke masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp. 209.519.000 (99,71%) yang terdiri dari:

- a. untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2021 sebesar Rp. 147.411.000 (realisasi 100%).
- b. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 Rp. 62.707.000 dengan realisasi Rp. 62.108.000 (99,04%).

1.2.16 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000. Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2022. Realisasi anggaran 29.904.000 (99,68%) yang diperuntukan bagi peningkatan capaian pelaksanaan imunisasi melalui pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi berupa pertemuan Dalam Rangka Persiapan Eliminasi Global Campak Rubella, Pertemuan Perencanaan Introduksi Imunisasi PVC.

1.2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000. Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2022. Realisasi keuangan sebesar Rp. 33.904.000 (96,87%). Realisasi kegiatan berupa Pertemuan evaluasi dan validasi data program kesehatan jiwa, Sosialisasi Penggunaan Alat HRV, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas

1.2.18 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000. bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2022. Realisasi anggaran Rp. 28.558.400 (95,15%) yang diperuntukan bagi Koordinasi Terpadu dan Orientasi Penyakit Malaria, Pertemuan Monitoring Evaluasi Program POPM Kecacangan, Pertemuan Monitoring Evaluasi Program HISP, Koordinasi dan Sosialisasi Aplikasi Silantor untuk Petugas Puskesmas

1.2.19 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 79.991.087.325 terserap sebesar Rp. 61.525.209.925 (75,92%). Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa pembayaran klaim Rumah Sakit dan Puskesmas bagi pasien yang menggunakan fasilitas program pelayanan kesehatan masyarakat jaminan kesehatan masyarakat perkotaan sebanyak 178.637 orang. Pembayaran klaim ini bagi rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung (13 Rumah Sakit) dan 31 Puskesmas.

Tabel 3.3 Data Kunjungan Pasien Pengobatan Gratis Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2022

No	Sarana	Kunjungan Pasien (Tahun)							Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Rumah Sakit	34.425	25.585	18.219	18.166	10.991	19.882	28.953	Data Bulan November
2.	Puskesmas	363.169	281.866	242.184	140.941	186.505	158.755	182.117	
	Jumlah	397.594	307.451	260.403	159.107	197.496	178.637	211.070	

1.2.20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 88.083.186.000 terserap sebesar Rp. 240.000.000 yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan penunjang dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui penyediaan telemedicine di Puskesmas. Dengan penyediaan alat kesehatan ini diharapkan kualitas kesehatan ibu hamil akan meningkat dan jumlah kematian ibu hamil melahirkan juga akan menurun. Kegiatan pengadaan terlaksana 100 persen melalui proses pengadaan dengan metode *e purchasing/ekatalog*. Pembayaran baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

1.2.21 Operasional Pelayanan Puskesmas. Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 88.083.186.000 terserap sebesar Rp. 77.401.184.809 atau mencapai 87,87 persen. Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa :

- a) Belanja BLUD yaitu pencatatan dan pelaporan belanja BLUD (31 Puskesmas) sebesar Rp. 66.696.846.000,00, realisasi anggaran Rp. 60.250.234.877,71 (90,33%)
- b) Biaya operasional Puskesmas Rp. 1.578.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 777.402.400 (49,24%). Biaya operasional ini merupakan dukungan dana dari APBD untuk operasional rutin Puskesmas seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan sampah dan operasional rutin lainnya.
- c) Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2022. Anggaran dipergunakan untuk dukungan kegiatan pelayanan di 31 Puskesmas terutama pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan

ini sebesar Rp. 18.228.740.000 dengan realisasi anggaran Rp. 16.373547.531 (89,82%).

d) Hutang kegiatan pendukung operasional Puskesmas tahun 2021 yang dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.578.800.000, tidak ada realisasi.

e) Pembayaran hutang kegiatan BOK tahun 2020 sebesar Rp. 8.047.642.500,00 (realisasi 100%).

1.2.22 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.138.061.000 sumber anggaran APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran Rp. 4.689.478.600 (35,69%). Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 35,69 persen berupa tersalurnya bantuan biaya operasional Posyandu dan Poskeskel sebanyak 705, yaitu untuk pembayaran transport kader Posyandu dan Poskeskel serta digunakan untuk pembayaran sewa gedung bangunan Poskeskel sebanyak 68 Poskeskel yang belum memiliki bangunan gedung sendiri dan 54 tempat Poskeskel lainnya adalah milik masyarakat yang di bangun dari dana pemerintah dan swasta.

1.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 10.000.000. Realisasi anggaran Rp. 8.204.400 (82,04%) yang dipergunakan untuk updating portal web Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai sarana penyebarluasan informasi.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 1.156.300.000. Output

kinerja dari program adalah Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar 71 persen dan persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 60 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 506.300.000 (43,79%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 350.000.000 (35,00%) untuk melaksanakan sub kegiatan pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar yaitu penyediaan insentif bagi tenaga non ASN dalam penanggulangan covid 19. Realisasi anggaran sesuai dengan kondisi saat ini jumlah penderita covid 19 yang sudah menurun dan dapat dikendalikan.

4.2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 156.000.000. yang dipergunakan untuk pembayaran hutang kegiatan tahun anggaran 2021 yang telah dilaksanakan.

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 321.839.975 yang bersumber dari Dana BPOM kementerian Kesehatan RI. Dengan realisasi Output kinerja berupa terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, toko obat) dan indsutri makanan rumah tangga yang ada di wi;ayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp.

187.107.975,00 (58,14%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.363.975 yang merupakan pembayaran hutang kegiatan tahun anggaran tahun 2021 yang telah dilaksanakan.

1.2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Badan penagawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berjumlah Rp. 156.740.000 dengan realisasi Rp. 91.660.000 (58,48%). Sebagian alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2021 yang telah selesai dilaksanakan Rp. 35.350.000. Output kegiatan adalah pembinaan monitoring kepada pelaku industri makanan dan minuman rumah tangga sehingga dalam produksi sesuai dengan standar kesehatan. Untuk pelaksanaan kegiatannya didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat

Diproduksi Oleh IRT. Untuk kegiatan tahun 2022 masih ada kegiatan yang akan dibayarkan di tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 28.350.000.

1.3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga. Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Badan penagawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 berjumlah Rp. 139.736.000. dengan realisasi anggaran Rp. 70.084.000 (50,15%). Sebagian alokasi anggaran dipergunakan untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2021 yang telah selesai dilaksanakan Rp. 32.584.000. Output kegiatan adalah monitoring hasil produksi makanan rumah tangga yang beredar di masyarakat (post market). Kegiatan dapat dilaksanakan 100 persen. Untuk kegiatan tahun 2022 masih ada kegiatan yang akan dibayarkan di tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 11.240.000.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 508.834.000 Dengan realisasi Output kinerja berupa terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, toko obat) dan indsutri makanan rumah tangga yang ada di wi;ayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 407.866.400,00 (80,16%). Dari jumlah alokasi anggaran tersebut Rp. 300.500.000 dipergunakan sebagai dana hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandar Lampung yang dipergunakan untuk operasional.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya berdasarkan target-target Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022, dapat disimpulkan:

1. Untuk indikator kinerja penurunan angka kematian ibu dan bayi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah mampu untuk menekan jumlah kasusnya, sehingga angka capaian kegiatan dibawah target yang telah ditetapkan. Untuk kasus kematian ibu sebanyak 4 Kasus, lebih rendah dari target yaitu 10 kasus.
2. Indikator kinerja prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk. Saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk menanggulangi kasus Tuberkulosis ini. Penemuan kasus secara dini terus dilakukan guna percepatan pengobatan, karena dengan penemuan secara dini maka penderita akan cepat diobat dan disembuhkan sehingga tidak menularkan kepada kepa orang lain. Jumlah kasus Tuberkulosis tahun 2021 yang ditemukan dan diobati sebanyak 207 per 100.000 penduduk dan tahun 2022 jumlah kasus yang ditemukan dan diobati meningkat menjadi 347 per 100.000 penduduk.
3. Untuk realisasi anggaran di tahun 2022 dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 322.948.660.177, dapat direalisasikan sebesar Rp. 266.296.837.440 (82,46%). Belum maksimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi pandemi covid 19 yang sampai saat ini masih terjadi, meskipun jumlah kasusnya sudah dapat

dikendalikan namun upaya-upaya untuk penyebaran kasus covid 19 ini terus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan terutama di area umum tertutup, penggunaan masker, pembatasan kegiatan kerumunan.

4.2. PEMECAHAN MASALAH

Upaya yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan realisasi anggaran pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi terkait penjadwalan pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program untuk keberhasilan kegiatan pembangunan bidang kesehatan karena program kesehatan tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan dan partisipasi semua stakeholder.
3. Meningkatkan upaya promotif, preventif melalui berbagai media untuk memberikan edukasi ke masyarakat dalam upaya pelaksanaan hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Terus meningkatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui peran kader kesehatan yang ada di Posyandu maupun Poskeskel terutama dalam hal promotif dan preventif penyakit. untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, terus peningkatan.

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

DESTI MEGA PUTRI, SP, MT
Nip. 19691202 199503 2 002